

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik akan selalu menarik untuk dibahas karena penuh kontradiksi. Dunia politik selalu identik dengan maskulinitas dimana di dalamnya jumlah laki-laki lebih banyak dan berkuasa. Oleh sebab itu, ketika seorang perempuan memutuskan untuk masuk atau terjun ke dalam dunia perpolitikan akan menjadi suatu hal yang tidak mudah. Perempuan relatif terisolasi dari struktur politik yang cenderung diwarnai dengan pandangan yang maskulin. Peluang masuknya laki-laki dan perempuan dalam kursi pemerintahan menjadi tidak seimbang. Perempuan bahkan dianggap tabu ketika dirinya harus terlibat di dalam perpolitikan tersebut. Selama ini paradigma yang terbangun selalu menganggap bahwa perempuan lebih baik bekerja di sektor privat, seperti mengurus urusan rumah tangga dan keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang merupakan kepala keluarga yang harus mencari nafkah dan mempunyai kesempatan berbeda dari perempuan di ranah publik. Adanya dikotomi privat dan publik ini sebenarnya yang membentuk struktur kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia perpolitikan. Akibat yang terjadi adalah perempuan menghadapi berbagai hambatan apabila mereka ingin berpartisipasi di dalamnya.

Keterwakilan perempuan di kursi pemerintahan dalam perjalanannya memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Adanya kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan suatu titik terang bagi perjuangan perempuan

untuk masuk dalam tatanan pemerintahan. Kembali pada sejarahnya, adanya UU yang mengatur keterwakilan perempuan pun sebenarnya sudah diperjuangkan sejak lama, tetapi dalam prosesnya memang bertahap. Terlihat dari mulai dicanangkannya keterlibatan perempuan dalam parlemen dalam UU no.31/2002 tentang parpol dan UU no.12/2003 mengenai pemilu. Dalam kedua undang-undang ini tercantumkan klausul mengenai tindakan afirmatif perempuan. UU no.31/2002 walaupun tidak secara spesifik mencantumkan angka 30% tetapi dalam penjelasan pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan<sup>1</sup>. Lebih diperjelas lagi pada UU No.12/2003 tentang Pemilu pasal 65 yang secara gamblang menyebutkan kuota 30% keterwakilan perempuan<sup>2</sup>. Adanya undang-undang yang mengatur masalah persentase keterwakilan perempuan ini memang disadari belum begitu konsisten mengingat bahwa dalam penerapannya hanya sekedar himbuan saja, tanpa disertakan oleh sanksi yang jelas dan tegas bila ada partai politik yang melanggar. Perjuangan perempuan telah menunjukkan keberadaannya secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam prosesnya sering mengalami jatuh bangun. Perlu diketahui juga, bahwasanya adanya perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu untuk dapat membawa perubahan yang berdampak baik bagi kemajuan perempuan-perempuan lain yang diwakilinya. Banyak kepentingan perempuan yang selama

---

<sup>1</sup> Soetjipto, Ani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas. hal.7

<sup>2</sup> ibid

ini belum mampu teraspirasikan dengan baik. Menurut Molyneux, kepentingan perempuan dikategorikan menjadi tiga konsep<sup>3</sup> :

1. Kepentingan perempuan (*women interest*) menjadi konsep yang sangat problematik mengingat identitas perempuan adalah identitas yang heterogen, hadir bersinggungan dengan identitas lain seperti kelas sosial, kelas ekonomi, etnis dan lain-lain sehingga tidak mungkin menggeneralisasi adanya satu kepentingan perempuan yang sama di berbagai tempat. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah membuat spesifikasi tentang kategori perempuan itu sendiri yang mungkin akan bertindak dan dipengaruhi secara berbeda oleh karena posisi sosial mereka,serta melalui identitas perempuan yang disandangnya.
2. Kepentingan Gender Praktis (*practical gender interest*) beranjak dari kondisi objektif yang kongkret dalam kerangka pembagian kerja gender berdasarkan posisi sosial perempuan. *Practical gender interest* tidak selalu membutuhkan kesadaran feminis tetapi dapat diformulasikan sendiri oleh perempuan berdasarkan posisi mereka dalam struktur sosial.
3. Kepentingan gender Strategis (*strategic gender interest*) merupakan analisis yang berasal dari subordinasi perempuan dan formulasi dari tujuan, keinginan, mimpi untuk membuat pengaturan baru dari pengaturan dan struktur yang ada saat ini. Hal ini juga bertujuan untuk mengakhiri subordinasi perempuan antara lain menghapus pembagian kerja seksual, meringankan beban ganda, menghapus institusi yang melanggengkan

---

<sup>3</sup> Arivia,Gadis.2013. "Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai:Strategi Gender". *Jurnal Perempuan*.Volume 20. No.6. Jakarta: Ford Foundation. Hal.53-54

diskriminasi dan menggantinya atau mereformasinya menjadi bentuk baru, dan juga memperjuangkan kesetaraan dan keadilan politik. Agar dapat menerapkan semua itu maka yang diperlukan adalah kesadaran sebagai seorang feminis.

Dari pengkategorian kepentingan perempuan di atas, jelas sudah bahwa ketika sosok seorang perempuan masuk ke dalam arena perpolitikan otomatis ada kepentingan perempuan yang ingin diperjuangkan. Dalam proses kandidasi tentu masing-masing perempuan memiliki kepentingan yg ingin diperjuangkan dengan cara atau mungkin motif yang berbeda-beda.

Dalam pemilihan legislatif tahun 2014 ini cukup banyak terlihat nama-nama perempuan yang berlaga dalam kontestasi politik ini, namun hal tersebut tetap tidak terlepas dari berbagai konflik di dalamnya, mengingat dalam proses kandidasi tersebut setiap perempuan berangkat dari latar belakang dan motif yang berbeda-beda. Tetapi hal tersebut merupakan angin segar bagi kaum perempuan yang mulai berani unjuk kebolehan di panggung politik. Salah satu hal yang terlihat cukup fenomenal dalam pemilu legislatif tahun 2014 ini adalah meningkatnya kandidat perempuan di berbagai daerah.

Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam dunia politik diakui mulai menunjukkan dinamika yang baik. Salah satu bukti nyatanya adalah peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di kursi perwakilan rakyat adalah di DPRD Kota Surabaya. Pada periode sebelumnya, dari 50 anggota dewan, jumlah perempuan yang mewakili aspirasi warga Kota Pahlawan sebanyak 15 orang, sementara pada periode lima tahun mendatang, meningkat menjadi 17 orang atau 34 % dari 50

anggota dewan<sup>4</sup>. Kemunculan perempuan dalam ranah politik ini menjadi angin segar, adanya perempuan di DPRD kota Surabaya tersebut, diharap mampu mewakili aspirasi perempuan lainnya. Di balik naiknya jumlah keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kota Surabaya yang meningkat, tentu itu semua tidak terlepas dari proses kandidasi di awal. Apakah mereka yang lolos sebagai caleg sudah benar benar *qualified* sebagai wakil rakyat. Persaingan dari masing-masing perempuan caleg tentu sangatlah sengit, mengingat dalam pemilihan legislatif kali ini berlaku pasar bebas, tidak lagi bergantung pada tata urutan penomoran calon. Berbagai dampak muncul dari fenomena tersebut khususnya bagi perempuan caleg. Perempuan caleg tidak hanya bersaing dengan caleg di luar partai, tetapi juga persaingan tersebut berlaku di dalam internal partai nantinya, oleh sebab itu partai politik sebagai kendaraan awal harus benar-benar mempertimbangkan siapa saja kandidat yang layak dan pantas mewakili partainya. Bagi partai politik yang sebelumnya telah aktif melakukan kaderisasi dalam berbagai organisasi sayap partai yang mereka miliki, tentu hal ini bukanlah menjadi hal yang sulit karena rekam jejak masing-masing kader jelas telah dimiliki. Faktanya, belum tentu semua partai politik melakukan proses kaderisasi tersebut dengan maksimal apalagi bagi partai-partai yang tergolong baru. Berbicara masalah kaderisasi, maka itu bukanlah persoalan waktu yang singkat, tentu di dalamnya ada proses. Pada pemilu 2014 ini, perempuan caleg benar-benar berhadapan dengan mekanisme pasar bebas, artinya kepopuleran yang dimiliki perempuan caleg

---

<sup>4</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/894359/23/17-perempuan-yang-menduduki-kursi-dewan-surabaya>. "17 Perempuan Menduduki Kursi Dewan Surabaya". Diunduh: Senin, 16 September 2014. Pukul 11.44 WIB

tentunya juga menjadi pertimbangan. Bagi partai politik yang tidak siap dengan sistem dan kader perempuan yang berkompeten akhirnya berdampak pada rekrutmen asal-asalan khususnya bagi perempuan. Kepopuleran seolah-olah menjadi satu-satunya kriteria yang membuat partai politik merekrut perempuan untuk dijadikan caleg tanpa melihat prestasi dan kemampuan yang dimiliki perempuan tersebut untuk sekedar memenuhi kuota 30% dan hanya untuk meraih suara partai sebanyak-banyaknya. Perempuan caleg harus bekerja ekstra untuk meyakinkan para petinggi partai politik agar dirinya mampu dipercaya partai maju dalam pemilihan legislatif. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi dibalik pencalonan perempuan di kursi DPR. Diyakini bahwasanya motivasi kandidat untuk maju dalam pileg 2014 pasti beragam, dan tidak dipungkiri juga dalam perjalanannya tampak sosok-sosok yang tampil ada yang hanya sekedar meramaikan. Motivasi perempuan untuk maju, hanya akan mungkin teraktualisasi melalui keberhasilannya dalam mengelola proses kandidasi yang mana mencakup dua dimensi yang saling berlawanan, yaitu dukungan (*supports*) dan hambatan (*obstacles*)<sup>5</sup>.

Proses rekrutmen kandidat perempuan di awal tentu menghadirkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Partai Politik yang memiliki perananan penting dalam tahap ini tentu akan memperhitungkan siapa saja kandidat yang sesuai dan nantinya akan dapat banyak dukungan dari masyarakat. Tabel berikut akan memperlihatkan berapa jumlah persentase perempuan dan laki-laki dari

---

<sup>5</sup> Tim Peneliti Departemen Ilmu Politik Fisip Unair.2011."Perempuan Dalam Pemilukada:Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara".Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia. Hal.10

masing-masing partai yang dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Surabaya dalam pileg 2014.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Perempuan dan Laki-laki Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Surabaya Tahun 2014**

No	Partai	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan (%)
1	NASDEM	29	21	42%
2	PKB	33	17	34%
3	PKS	33	17	34%
4	PDIP	30	17	36%
5	GOLKAR	33	17	34%
6	GERINDRA	33	17	34%
7	DEMOKRAT	33	17	34%
8	PAN	33	17	34%
9	PPP	33	17	34%
10	HANURA	31	16	34%
14	PBB	20	13	39%
15	PKPI	32	18	36%

Sumber: KPU Kota Surabaya, diolah

Menyertakan 30% keterwakilan perempuan merupakan syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat maju dalam pemilihan umum 2014. Kota Surabaya, menjadi salah satu kota yang mana dalam pemilihan legislatif khususnya nampak banyak terdaftar nama-nama perempuan. Terlepas dari berbagai motif dibaliknya, banyaknya caleg-caleg perempuan ini cukup menjadi kabar baik, khususnya bagi kaum perempuan.

Tabel di atas merupakan daftar jumlah calon legislatif anggota DPRD Kota Surabaya, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai partai peserta dalam pileg 2014. Semua partai di atas menyertakan keterwakilan perempuan lebih dari 30%. Persentase caleg perempuan terbesar untuk tingkat DPRD Kota Surabaya diraih oleh partai Nasdem sebesar 42%, diikuti oleh Partai Bulan

Bintang sebesar 39 %, dan partai PDIP dan PKPI meraih persentase yang sama yaitu 36%. Persentase terendah pun juga masih melebihi dari kuota yang seharusnya. Partai PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PAN, Hanura meraih persentase yang sama yakni 34%. Banyaknya nama-nama caleg perempuan tiap partai diatas tentu juga masing-masing menyimpan misteri. Mengapa demikian? Setiap partai tentu memiliki kebijakan dalam proses rekrutmen hingga ditetapkan menjadi kandidat untuk maju dalam pileg 2014. Yang menjadi menarik adalah, dibalik banyaknya nama-nama caleg perempuan yang mengikuti pileg 2014, bagaimana proses atau tahapan kandidasi itu berjalan, karena tidak dapat dipungkiri juga banyaknya jumlah perempuan yang dicalonkan apakah semuanya benar-benar berkualitas dan berintegritas tinggi untuk membawa aspirasi rakyat, atau aspirasi partai, atau hanya sebagai pajangan dan pelengkap persyaratan pemilu saja. Belum tentu semua perempuan yang direkrut menjadi kandidat caleg paham benar dan berlatarbelakang dunia politik yang baik karena disadari banyak dari antara calon kandidat tersebut berangkat dari berbagai profesi entah itu pebisnis, ibu rumah tangga, aktivis dan lain sebagainya. Tetapi, apakah semua perempuan yang menjadi kandidat memiliki kesadaran politik yang tinggi atau kapasitas yang mumpuni? Partai Politik sebagai kendaraan politik di awal bagi kaum perempuan terkadang masih memandang remeh terhadap keberadaan perempuan sehingga hanya memosisikan perempuan sebagai pelengkap dan pemanis saja. Adanya UU pemilu yang mengusung 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif tentu sangat berdampak bagi kemajuan perempuan, karena otomatis berimplikasi dimana kaum perempuan



berbondong-bondong di daftarkan menjadi calon legislatif<sup>6</sup>. Adanya UU ini tentu tidak terlepas dari pro dan kontra, karena disadari masih banyak partai politik yang kaget sehingga cenderung tidak siap, tetapi titik terang bagi kaum perempuan adalah yang tadinya partai politik cenderung acuh terhadap perempuan akhirnya mau tidak mau menjadi peduli. Dalam penelitian Tim Pusham Unair tahun 2013 menemukan berbagai fenomena rekrutmen kandidat caleg yang dapat dikatakan kurang layak, ada yang mengaku dan didatangi dan diajak bergabung dengan partai tersebut hanya karena ia istri seorang kepala desa, istri salah satu pengurus atau ketua parpol, atau ibu rumah tangga yang awam masalah politik<sup>7</sup>. Karena banyak parpol yang hanya mengajukan caleg perempuan sekedar untuk memenuhi syarat 30% keterwakilan, sejumlah caleg perempuan itu hanya dipinjam namanya kemudian ditampilkan sebagai caleg tanpa harus berkampanye dan turun ke lapangan, jadi sangat tidak mungkin caleg perempuan tersebut dapat terpilih<sup>8</sup>. Dari fenomena diatas kita dapat lihat bahwasanya pola rekrutmen asal-asalan seperti itu akan berdampak pada kepentingan perempuan yang akhirnya tidak akan terwakili, padahal alasan perlu adanya perempuan dalam parlemen adalah agar mampu menyalurkan dan mewakili aspirasi perempuan lainnya yang tidak dapat diwakilkan oleh kaum laki-laki. Itu sebabnya perjuangan perempuan akan jauh lebih berat dan tidak mudah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dalam proses kandidasi, perempuan kandidat juga perlu adanya dukungan, baik berupa

---

<sup>6</sup> Budiono, Bambang. 2013. *Perjuangan Perempuan dan Keadilan Gender*. Surabaya: Pusham Surabaya. Hal. 25

<sup>7</sup> Ibid. hal 26

<sup>8</sup> <http://politik.kompasiana.com/2014/05/13/jumlah-wakil-perempuan-di-dpr-2014-2019-kenapa-berkurang-656273.html>. "Jumlah Wakil Perempuan di DPR 2014-2019, Kenapa Berkurang". Diakses Kamis, 11 September 2014. Pukul 21.19

dukungan eksternal (seperti partai politik, ormas) dan juga dukungan internal (keluarga). Oleh sebab itu ketika terjun sebagai kandidat politik banyak faktor yang perlu secara jeli diperhatikan. Memperoleh dukungan dari parpol tidaklah mudah, perempuan kandidat harus berusaha meyakinkan petinggi-petinggi partai yang sebagian besar didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam kasus kandidasi ini partai politik memegang peranan yang cukup besar bagi perempuan kandidat. Tetapi belum tentu semua partai politik peka terhadap kebutuhan perempuan yang menjadi kandidat tersebut. Ketika memutuskan untuk menjadi kandidat, dukungan keluarga juga mempengaruhi, karena disadari pula sosok perempuan dituntut untuk mampu mengurus kehidupan rumah tangganya juga sebelum mereka terjun ke dalam ruang publik. Adanya hubungan darah atau kedekatan dengan petinggi parpol atau orang-orang berpengaruh dari sosok perempuan kandidat tersebut diakui memang tak jarang dijadikan alasan mengapa perempuan tersebut dikandidatkan. Diakui, bahwa seseorang perempuan kandidat yang berasal dari dinasti politik mempunyai banyak keunggulan. Selain nama keluarga yang dikenal, mereka juga memiliki kekuatan finansial serta kemampuan mobilisasi massa dari anggota dinasti yang sedang memegang jabatan tertentu<sup>9</sup>. Tentunya hal tersebut akan berdampak bagi dukungan suara bagi perempuan kandidat tersebut ketika berlaga di kontestasi politik yang sesungguhnya.

Fenomena lain yang ada dibalik kandidasi, ketika sosok perempuan tersebut berlaga dalam dunia perpolitikan, tak jarang dihadapkan pada kenyataan bahwa ongkos pemilu bagi kandidat yang bertarung itu sangat mahal. Banyak

---

<sup>9</sup> Arivia, Gadis dkk. 2013. "Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran". *Jurnal Perempuan*. Vol.18.No. 4. Jakarta: Ford Foundation. Hal. 17

perempuan yang potensial tetapi tidak didukung dengan dana yang maksimal. Modal finansial mau tidak mau menjadi pertimbangan perempuan caleg yang bertarung. Apalagi berbagai fenomena politik uang dalam pileg 2014 ini begitu santer merebak ditelinga masyarakat. Tidak hanya modal finansial yang harus diperhitungkan oleh perempuan kandidat. Modal sosial seperti bagaimana perempuan kandidat dapat berinteraksi dan menjalin relasi dengan konstituennya kelak, dan Modal Politik yaitu adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi rakyat.

Memilih maju menjadi kandidat merupakan keputusan penting dan penuh pertimbangan. Dalam kandidasi perempuan ini menarik dibahas karena berusaha menguak atas dorongan dan motivasi apa perempuan berani bertanding dalam pileg 2014 khususnya di wilayah Kota Surabaya. Banyak faktor yang dapat mendukung proses kandidasi perempuan tersebut tetapi tidak dipungkiri juga dalam perjalanannya menemukan berbagai hambatan, apalagi di parlemen maskulinitas begitu dominan. Warna baru dalam pileg 2014 ini terlihat dengan banyaknya nama-nama caleg perempuan yang ramai menghiasi panggung kontestasi politik. Adanya peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kota Surabaya merupakan bukti nyata kontribusi perempuan di dalam dunia perpolitikan dengan harapan mampu benar-benar mewakili aspirasi perempuan lainnya. Kesangsian masyarakat terhadap perempuan yang terjun ke dalam dunia politik, merupakan dampak begitu kuatnya budaya patriarkhi yang selama ini terbangun. Mengubah *mindset* masyarakat khususnya terhadap perempuan yang ingin masuk ke dunia politik tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan

adanya kuota 30% dirasa sebagai strategi lain yang mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Tahap kandidasi politik dalam suatu partai tidak dapat dipungkiri menjadi suatu penentu suksesnya kandidat yang diusungnya. Selama partai politik tidak mampu melakukan rekrutmen perempuan kandidat dengan baik dan tidak ada kaderisasi bagi perempuan yang memadai maka tidak mengherankan jika wajah dunia perpolitikan akan terus didominasi dengan laki-laki. Dalam proses kandidasi ini banyak sekali faktor yang harus diperhitungkan. Motivasi, dukungan, latar belakang dan hambatan bagi setiap perempuan kandidat tentu akan berbeda-beda hingga mereka bisa dikandidatkan yang akhirnya membuat proses kandidasi caleg dalam pileg 2014 ini sangat menarik untuk diteliti, didukung dengan berbagai fenomena baru yang marak dalam tahun politik ini. Partai politik menjadi sangat berperan dalam tahap ini karena kandidat yang diusung akan membawa nama baik partainya. Oleh sebab itu, partai politik dituntut untuk selektif dalam memilih kandidat, sehingga mampu menghadirkan sosok perempuan kandidat yang berintegritas, kredibel dan berkapasitas tinggi. Berangkat dari berbagai fenomena dalam pemilihan legislatif 2014 maka penelitian ini berusaha melihat bagaimana proses kandidasi yang ada terhadap caleg perempuan khususnya di DPRD Kota Surabaya.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Apa motivasi perempuan untuk menjadi kandidat suatu partai politik dalam pileg 2014 DPRD Kota Surabaya?
2. Bagaimana proses kandidasi caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014 di DPRD Kota Surabaya?

### **I.3. Tujuan**

1. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi motivasi perempuan untuk menjadi kandidat suatu partai politik dalam pileg 2014 di DPRD Kota Surabaya.
2. Untuk memahami proses kandidasi caleg perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 di DPRD Kota Surabaya.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1. Manfaat Akademis**

Adapun penelitian ini secara akademis diharapkan mampu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu politik. Banyak fenomena yang terjadi ketika perempuan terjun dalam dunia politik, begitu pula dalam penelitian kandidasi caleg perempuan di DPRD Kota Surabaya ini, diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang isu-isu gender di lingkup politik yang tak jarang masih kurang responsif terhadap perempuan. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini otomatis membuka pemikiran masyarakat atau mahasiswa tentang bagaimana proses kandidasi caleg perempuan dalam pemilihan legislatif khususnya di DPRD Kota Surabaya, sehingga adapun hasil penelitian ini mampu dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait di dalamnya.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan lebih mendalam bagaimana proses kandidasi yang dialami oleh masing-masing calon legislatif perempuan dalam Pileg 2014 khususnya di DPRD Kota

Surabaya, karena disadari dalam tahapan kandidasi ini perempuan yang dikandidatkan berangkat dari latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda. Selain itu dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pemahaman proses kandidasi caleg perempuan yang dilakukan oleh masing-masing parpol terkait dengan kandidasi perempuan.

## **I.5 Konseptualisasi**

### **I.5.1 Kandidasi**

Istilah kandidasi dalam dunia politik tidak cukup asing didengar. Sebenarnya arti dari kandidasi ini adalah tahapan dimana proses partai politik menjangking, menseleksi dan menempatkan kader-kader yang dirasa kompeten dan akan diadu sebagai calon legislatif, sebelum benar-benar maju dalam kontestasi yang sesungguhnya yaitu dalam pemilihan legislatif. Partai politik memiliki peranan penting dalam tahapan kandidasi ini karena dalam prosesnya berusaha mencari kandidat yang terbaik dari kandidat-kandidat lain yang potensial. Banyak faktor yang dipertimbangkan suatu parpol untuk memutuskan seseorang menjadi kandidat, dengan harapan bahwa kandidat yang diusungnya tersebut mampu mendulang banyak suara yang tentunya akan menguntungkan partai. Oleh sebab itu dalam tahap awal ini, proses kandidasi menjadi sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap langkah berikutnya.

### **I.5.2 Calon Legislatif**

Maraknya nama-nama caleg perempuan dalam pesta demokrasi 2014 ini mewarnai panggung kontestasi politik. Sebelum benar-benar terpilih sebagai anggota dewan, tentu harus bersaing terlebih dahulu dengan calon-calon yang

memiliki tujuan yang sama yakni menduduki kursi legislatif. Menurut Kamus Pemilu Indonesia definisi dari Calon Legislatif adalah orang-orang yang berdasarkan per-timbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.

### **I.5.3 Pemilu Legislatif**

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Siapa saja yang akan duduk di kursi anggota dewan untuk mewakili aspirasi rakyat ini ditentukan dalam pemilihan legislatif tersebut dalam 5 tahun sekali. Tahun 2014 ini merupakan pemilihan legislatif yang keempat.

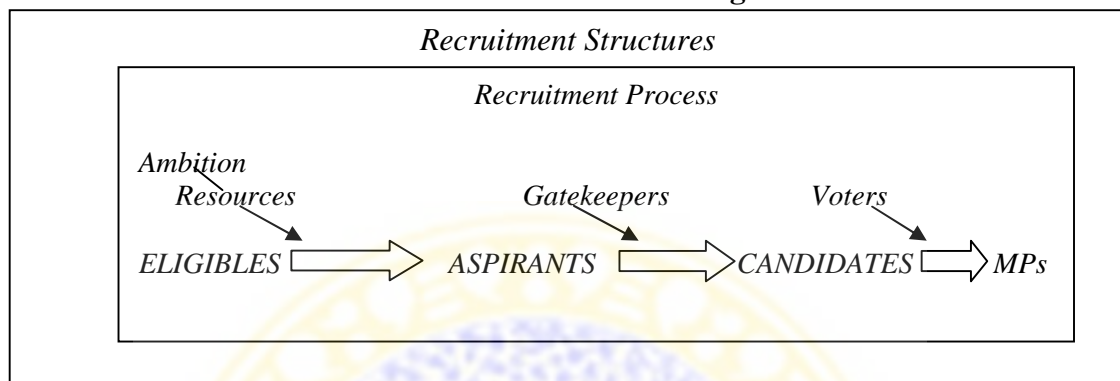
## **I.6 Kerangka Teoritik**

### **I.6.1 Teori Kandidasi**

Dalam penelitian ini menggunakan teori kandidasi dari Matland untuk semakin memperkuat hasil penelitian, karena dirasa teori ini cukup relevan untuk mengkaji fenomena kandidasi dalam pileg 2014 khususnya di Kota Surabaya. Tahap kandidasi yang dilakukan diawal dengan pola rekrutmen oleh partai menjadi hal yang penting sebelum akhirnya nanti perempuan kandidat tersebut ditetapkan untuk maju sebagai calon legislatif. Dalam pandangan Matland ada tiga tahap yang harus diperhatikan sebelum benar-benar masuk dalam dunia

politik. Proses kandidasi Matland ini akan lebih diperjelas dalam skema proses rekrutmen legislatif atau biasa disebut dengan proses kandidasi.

**Gambar I.1**  
**Proses Rekrutmen Legislatif**



Sumber: Diadaptasi dari P.Norris "Legislative Recruitment" di dalam L.Leduc, R. Niemi dan P.Norris, red.1996. *Comparing Democracies : Elections and Voting in Global Perspective*, London: Sage.Hal. 196

Pada gambar I.1 menjelaskan tentang pola dari proses rekrutmen legislatif atau yang biasa disebut dengan tahap kandidasi dimana masing-masing kandidat berkontestasi sebelum nantinya benar-benar terpilih sebagai anggota legislatif. Dalam teori nya Matland mengungkap bahwa ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses kandidasi ini<sup>10</sup> :

1. Seleksi diri, maksudnya adalah sejauh mana perempuan berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik. Dalam tahapan ini keputusan kandidat untuk *running for office* juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ambisi dan peluang untuk mencalonkan diri. Sejahter mana sosok kandidat tersebut mampu melihat antara ambisi dan mampu

<sup>10</sup> Matland, Richard. 2005. *Echancing Women's Political Participation : Legislative Recruitment and Electoral System*. Dalam Julie Ballington, *Women in Parliamen: Beyond Numbers*. Sweden: International IDEA. hal 1-5



memanfaatkan peluang yang ada. Adanya sumber daya yang dimiliki oleh perempuan kandidat nantinya juga akan mempengaruhi ambisi dan kesempatan untuk maju dalam pencalonan.

2. Diseleksi oleh partai politik. Proses penominasian kandidat oleh partai politik ini tentu menjadi tahapan yang penting. Prosedur nominasi dalam setiap negara pun, berbeda-beda. Luasnya partisipasi sentralisasi dan desentralisasi dari proses itu dapat pula menjadi faktor pembeda di masing-masing negara. Sebagai contoh, yaitu pemilihan awal di Amerika Serikat atau di Kanada dimana semua anggota partai melakukan rapat anggota yang diatur oleh partai-partai besar. Pada sisi lain pada dari spektrum tersebut adalah sistem dimana pemimpin partai, para pemimpin faksi nasional, atau eksekutif nasional memilih kandidat seperti pemilihan kandidat-kandidat Partai Demokrasi Liberal (LDP) di Jepang yang sangat kentara berada di bawah kontrol para pemimpin faksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus partai politik memiliki peranan yang besar dalam merekrut dan menempatkan kandidat perempuan dalam daftar calon. Diketahui bahwa politik yang cenderung identik dengan maskulinitas akhirnya tak jarang kalau kita melihat fenomena perempuan berkualitas tidak mendapat tempat di kepengurusan partai politik.

Setidaknya ada dua pola dalam proses seleksi dan nominasi kandidat oleh parpol. *Pertama* seleksi yang menggunakan pola *Patronage-Oriented System* dimana aturannya kurang jelas, kewenangan

berdasarkan pada kepemimpinan tradisional daripada kewenangan legal-rasional, loyalitas pada kekuasaan di partai adalah utama. Meskipun berbagai sistem menekankan faktor-faktor yang berbeda dalam memilih para kandidat, namun di bawah setiap sistem, suatu pertimbangan yang penting bagi partai adalah menghadirkan para kandidat yang akan memaksimalkan suara mereka, sehingga proses kandidasi bukan menjadi bagian yang utama. *Kedua*, seleksi yang menggunakan pola *bureaucratic-oriented system*, sebuah pola dimana aturan seleksi detil, terstandarisasi, eksplisit, mengabaikan siapa yang ada dalam posisi kekuasaan, kewenangan berdasarkan prinsip legalistik. Karakteristik kandidat yang mampu mendatangkan banyak pemilih dalam pemilihan merupakan karakteristik yang diperhitungkan partai. Kemungkinan yang terkuat, kandidat yang memiliki karakteristik tersebut adalah mereka yang memangku jabatan lama dinominasikan kembali dalam pemilu. Bahkan untuk kandidat yang baru, sejarah kandidat dan aktivitasnya dengan partai menjadi suatu yang penting dipertimbangkan.

Dalam tahapan diseleksi oleh partai ini gatekeepers yang berperan adalah tim seleksi dengan menjalankan kebijakan masing-masing partai.

3. Pemilihan. Dalam Konteks pemilihan ini berarti kandidat dipilih oleh pemilih. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses kandidasi sebelum akhirnya kandidat duduk dalam parlemen. Di beberapa negara menganggap bahwa suara perorangan yang didapatkan oleh kandidat itu penting. Oleh karena itu banyak partai yang merasa bahwa seleksi yang

dilakukan partai terhadap suatu kandidat itu penting karena mempengaruhi perolehan suara partai politik terutama dalam pemungutan suara dengan daftar terbuka. Dalam daftar calon terbuka para kandidat tidak saja harus bersaing dengan kandidat lainnya di lain partai tetapi juga di dalam partai. Sehingga tidak jarang kandidat perempuan melakukan hal yang sama dengan kandidat laki-laki ketika maju dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu adanya partai politik sebagai kendaraan politik masing-masing kandidat memiliki efek yang sangat besar khususnya dalam memperlakukan masing-masing kandidat.

Teori Matland mengenai proses kandidasi ini pun sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pipa Norris. Dalam tulisan Pipa Norris yang berjudul “*Political Recruitment*” juga terbagi menjadi 3 tahapan<sup>11</sup>, Pertama yaitu sertifikasi menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kandidat dengan memperhatikan berbagai faktor baik itu UU pemilu, aturan-aturan partai dan norma-norma sosial dan informal yang nantinya menentukan kriteria dalam kandidasi. Kedua, yaitu nominasi berdasarkan tersedianya jabatan yang memenuhi syarat dan adanya permintaan dari selektor untuk memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga, pemilihan yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang menang dalam jabatan legislatif. Suksesnya pemilihan kandidat juga dibentuk oleh non partisipan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah faktor informal. Seperti adanya dukungan yang diberikan oleh media massa, memenuhi kuota wanita, dukungan finansial atau sumber

---

<sup>11</sup> Pipa Norris dalam Richard Skatz dan William Crotty, *Hanbook of Party Politic*, London: Sage Publication, 2006. Hlm. 90.

daya keuangan parpol, ketokohan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lainnya yang memiliki pengaruh dalam suksesnya pemilihan kandidat. Dalam pandangan Matland dan Norris hampir menunjukkan banyak kesamaan dalam proses kandidasi ini, yang membedakan adalah pada tahap pertama Matland lebih memfokuskan bagi perempuan yang ingin maju ke dalam pemilihan maka terlebih dahulu harus menseleksi sejauh mana dirinya berkompeten. Artinya, sejauh mana sosok kandidat tersebut mampu melihat antara ambisi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Perbedaan dengan pandangan Pipa Norris dimana tahapan pertama dalam proses kandidasi ini adalah sertifikasi dan faktor yang menentukan untuk memenuhi syarat menjadi kandidat berdasarkan UU pemilu, aturan-aturan partai dan norma norma baik sosial ataupun informal.

Teori kandidasi Matland dirasa relevan dengan penelitian yang berfokus pada proses kandidasi perempuan caleg di Kota Surabaya pada tahun 2014 dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang ada, dengan diperkuat pandangan Pipa Norris bahwa selain motivasi diri terdapat juga faktor seperti UU pemilu, aturan-aturan partai politik dan norma sosial-informal yang mempengaruhi proses kandidasi perempuan caleg.

## **1.7 Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1.7.1 Metode dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Definisi dari metodologi kualitatif itu sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci<sup>12</sup>. Dari pernyataan diatas diketahui bahwasanya dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, yang mana tujuannya adalah bukan untuk memahami realita tunggal, tetapi realita majemuk sehingga pada pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya<sup>13</sup>. Terkait dengan judul penelitian ini, selain untuk mengetahui bagaimana proses kandidasi terhadap caleg perempuan, peneliti juga ingin mengetahui dibalik proses kandidasi tersebut apa yang menjadi motivasi caleg perempuan tersebut terjun ke dalam dunia politik, mengingat motivasi setiap perempuan kandidat tentu tidak sama apalagi ketika perempuan terjun ke dalam dunia politik akan mengalami proses yang bisa dikatakan tidak semudah kaum laki-laki. Peneliti tidak hanya mewawancarai caleg perempuan terkait tetapi juga mencari data dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kandidasi tersebut, sehingga dengan begitu data yang didapat menjadi kaya dan menjadi valid. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dirasa cukup relevan guna menggambarkan realitas-realitas yang sebenarnya terjadi sejalan dengan proses kandidasi tersebut, sehingga peneliti menggunakan pendekatan tersebut guna mendeskripsikan suatu situasi sosial di balik fenomena-fenomena yang ada.

Masuknya perempuan dalam dunia perpolitikan memang diakui tidak mudah, tetapi fenomena tersebut perlahan tapi pasti dibuktikan dengan banyaknya bermunculan nama-nama sosok perempuan dalam setiap kandidat

---

<sup>12</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad.2009. *Metode penelitian Kualitatif*.Bandung:CV.Pustaka Setia.hal.57

<sup>13</sup> Ptilima,Hamid.2007.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta. hal.59

partai politik khususnya di DPRD Kota Surabaya. Dalam perjalanannya, tentu sosok perempuan kandidat memiliki motif tertentu ketika memutuskan untuk terjun dalam dunia politik tersebut. Mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan secara mendalam dirasa cukup memungkinkan untuk menggali informasi atau data dari masing-masing sosok perempuan kandidat.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendeskripsikan bagaimana proses kandidasi dari caleg perempuan. Artinya, dalam penelitian ini hanya terfokus dalam perjalanan sosok perempuan sampai menjadi caleg di DPRD Kota Surabaya. Jadi masuk atau tidaknya caleg perempuan tersebut dalam kursi DPR atau strategi pemenangan caleg tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian ini karena hal itu merupakan bahasan tersendiri di luar topik proses kandidasi.

### **I.7.2 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses kandidasi sosok perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 khususnya DPRD Kota Surabaya. Diketahui selama ini dunia perpolitikan dianggap tabu untuk diminati oleh kaum perempuan, adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tentu merupakan angin segar bagi perempuan dengan harapan agar mampu menyuarakan kepentingan perempuan perempuan lainnya yang selama ini terlihat banyak sekali mengalami ketimpangan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dalam proses kandidasi tersebut, belum tentu motivasi setiap kandidat perempuan sama, begitu pula dengan dukungan dan hambatan yang ada dalam proses perjalanannya. Hal-hal tersebut yang mungkin akhirnya membuat proses

kandidasi caleg perempuan khususnya di DPRD Kota Surabaya menjadi tidak sama dan proses ini lah yang akan menjadi menarik untuk dibahas.

### **I.7.3 Lokasi Penelitian**

Terkait dengan judul yang digunakan mengenai Kandidasi Caleg Perempuan DPRD Kota Surabaya dalam Pileg 2014, maka penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya. Banyaknya caleg perempuan dalam pemilihan legislatif di Surabaya juga menjadi bahan pertimbangan dilakukannya penelitian ini. Selain itu, mengingat adanya akses atau link yang dirasa cukup memudahkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

### **I.7.4 Subyek penelitian**

Pada dasarnya subyek penelitian atau informan maupun partisipan dalam kualitatif adalah orang yang berikhtiar dalam pengumpulan data. Peneliti memutuskan untuk memilih 4 calon legislatif perempuan DPRD Kota Surabaya yang mengikuti Pileg 2014 lalu. Caleg perempuan yang mana sebagai informan tersebut diajukan dari partai-partai yang berbeda dengan tujuan agar data lebih variatif. Caleg perempuan yang diajukan sebagai informan terbagi menjadi 2 kategori baik itu yang lolos dan yang tidak lolos dalam pileg 2014 hal ini dikarenakan peneliti hanya berusaha mendeskripsikan bagaimana proses caleg perempuan tersebut mampu menjadi kandidat bukan strategi pemenangnya.

**Tabel I.2**  
**Nama Narasumber Penelitian**

<b>NARASUMBER</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>NARASUMBER</b>	Lilyana Pandheroit	Caleg Partai Nasdem

<b>UTAMA</b>	Ratih Retnowati	Caleg Partai Demokrat
	Yustya Yusuf	Caleg Partai Golkar
	Lembah Setyowati	Caleg Partai Golkar
<b>NARASUMBER TAMBAHAN</b>	Agus Purnomo	Sekretaris Partai Golkar DPC Kota Surabaya
	Hartoyo	Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur
	Agus Dono	Demokrat
	Reno	Demokrat
	Teddy Tahapary	Golkar
	Giovani	Anggota keluarga Lembah Setyowati (caleg Golkar)
	Ishak	Pengurus Partai Nasdem

### **I.7.5 Prosedur Penentuan Informan**

Dalam skripsi kandidasi perempuan caleg di Kota Surabaya dalam Pemilihan legislatif 2014 ini, peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan siapa saja orang-orang yang akan dijadikan informan. Purposive sampling dirasa relevan dalam skripsi ini karena dari awal peneliti telah mengetahui siapa saja yang berkompeten dijadikan informan sesuai dengan judul penelitian. Peneliti memutuskan untuk mewawancarai empat caleg perempuan dari partai Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Pertimbangan memilih keempat informan ini adalah melihat latar belakang yang unik dari masing-masing perempuan caleg, baik itu latar belakang profesinya, prestasi dan akses politik yang dimiliki. Perempuan caleg saja dianggap peneliti tidaklah cukup untuk



memperkuat data, maka pihak-pihak yang terlibat seperti pengurus partai dan tim seleksi juga menjadi target sasaran peneliti untuk menjadi informan sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kuat.

### **I.7.6 Prosedur Pengumpulan Data**

Mulai bermunculannya nama-nama caleg perempuan dalam pileg 2014 ini merupakan angin segar bagi kaum perempuan. Diketahui bahwa dunia politik begitu maskulin dan untuk bergabung di dalamnya sosok perempuan harus mengeluarkan tenaga ekstra. Khususnya di wilayah Surabaya, adanya keterlibatan perempuan dalam dunia politik begitu nyata melihat begitu banyak nama-nama caleg perempuan yang ikut meramaikan pemilihan legislatif 2014 ini. Maka untuk menggali data terkait proses kandidasi, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah wawancara mendalam. Melalui wawancara mendalam realitas dibalik fenomena yang muncul dapat terkuak lebih jelas. Dalam buku metodologi penelitian karya Dr. Deddy Mulyana (2001:180) mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara beserta mencantumkan isu-isu sehingga berguna untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas atau ditanyakan kepada caleg perempuan di DPRD Kota Surabaya. Wawancara dilakukan kepada Kandidat perempuan dalam pileg 2014 khususnya DPRD Kota Surabaya dan pengurus parpol yang mengusung atau berperan dalam proses kandidasi caleg perempuan

tersebut. Dalam tahap wawancara ini, peneliti tidak menentukan batasan lama waktu wawancara, mengingat setiap narasumber memiliki kesibukan yang berbeda-beda, sehingga wawancara dilakukan di tengah kesibukan dari masing-masing caleg perempuan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Tak jarang dalam menentukan jadwal wawancara, peneliti menemukan hambatan akibat begitu banyaknya kesibukan dari narasumber. Pembatalan wawancara secara mendadak dari narasumber juga sering dialami peneliti. Tetapi hambatan tersebut segera dapat diatasi oleh peneliti.

Selain dengan adanya teknik wawancara, dilakukan pula observasi guna untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi tersebut dilakukan terhadap subyek, perilaku subjek dan interaksi subjek dengan peneliti.

Selain menggunakan wawancara dan observasi, pada penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, yakni mencari informasi penting yang mendukung hasil dari penelitian ini yang terdapat pada buku atau literatur-literatur bacaan terkait dengan judul penelitian. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, wawancara dan observasi langsung dilapangan, dimaksudkan peneliti mampu untuk memperoleh data sekaligus informasi yang lebih akurat dan mendalam terkait dalam penelitian proses kandidasi caleg perempuan dalam pileg 2014 di DPRD Kota Surabaya .

### **I.7.7 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang hendak diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh fakta dan data-data yang akurat maka

bagaimana proses kandidasi yang berlangsung akan diperkuat dengan data primer yang merupakan hasil dari wawancara mendalam dari subyek penelitian yaitu caleg perempuan DPRD Kota Surabaya , tim seleksi dan partai pengusung kandidat tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dengan judul dan juga beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait guna menunjang informasi dan hasil dari penelitian.

### **I.7.8 Proses analisis Data**

Prosedur analisis data bertujuan agar data-data yang ada disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam buku metode penelitian karya Afifuddin (2009:159) menyebutkan bahwa prinsip pokok teknik analisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Proses analisis dilakukan setelah dilakukan studi pustaka terkait dengan proses kandidasi politik , wawancara mendalam dengan berbagai informan yang telah ditentukan (caleg perempuan, tim seleksi, dan partai pengusung), dan observasi di lapangan (maksud dari observasi di lapangan disini adalah melihat interaksi dari narasumber ketika diwawancara). Pengolahan data mentah yang diperoleh guna mendapatkan informasi lebih mendalam lagi. Hasil dari wawancara yang telah direkam tadi kemudian di dengarkan ulang, sebelum nantinya akan ditranskrip. Kemudian, peneliti melakukan penentuan manakah data wawancara yang relevan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, serta mana yang tidak. Lalu dilakukan pengkategorian data berdasarkan pertanyaan yang sama, dengan jawaban informan yang berbeda-beda untuk dianalisis apakah ada kemiripan antar jawaban sebelum pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari

hasil penelitian ini. Sehingga dari data data yang telah diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun peneliti.

